

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Salah satu kawasan yang selalu menarik dan sampai sekarang masih sering mengguncang seluruh masyarakat dunia dengan fenomena-fenomenanya baik politik, ekonomi maupun budaya adalah kawasan Asia Tenggara. Tidak terkecuali negara Thailand yang sangat rentan terhadap fenomena-fenomena yang sangat berpengaruh bagi negara-negara di dunia, mulai dari demokratisasi, birokrasi sampai pada masalah ekonomi yang mana negara Thailand juga mengalami Krisis Ekonomi seperti yang dialami oleh negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Dalam peristiwa krisis politik yang terjadi di Thailand pada 19 September 2006 lalu, mengundang banyak perhatian masyarakat dunia Internasional. Peralnya, setelah militer Thailand menyatakan tidak akan campur tangan dalam perpolitikan Thailand sejak tahun 1991, kini mengejutkan semua kalangan dengan munculnya kembali militer dalam politik Thailand. Yaitu terjadinya kudeta militer terhadap PM Thaksin Shinawarta.

Oleh karena itu penulis menganggap masalah ini sangatlah menarik dan penting untuk dikaji dalam perpolitikan dunia saat ini. Dalam kesempatan ini

penulis memilih judul "KUDETA MILITER TERHADAP PM THAKSIN

B. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengapa militer melakukan kudeta terhadap PM Thaksin Shinawarata.
2. Penulis ingin mencoba menerapkan teori-teori yang telah penulis terima selama perkuliahan untuk menemukan hipotesa-hipotesa yang relevan dalam menjawab semua permasalahan yang diajukan.
3. Untuk memenuhi syarat akhir dalam menyelesaikan studi akademis dan menyelesaikan jenjang keserjanaan di jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Thailand adalah sebuah negara yang perjalanan sejarah kekuasaannya penuh dengan kudeta militer. Sejarah Thailand modern dimulai pada tahun 1932. Di mana pada waktu itu sekelompok birokrat menengah melakukan kudeta terhadap raja dan mengubah bentuk pemerintahan dari Monarki Absolut menjadi Monarki Konstitusional.¹ Dengan ini Pemerintahan Thailand dilaksanakan didasarkan pada Demokrasi parlementer. Sejak di gunakannya sistem Demokrasi Parlementer tersebut, arena politik Thailand selalu diwarnai oleh persaingan antara politisi sipil dan militer. Persaingan ini menggunakan berbagai cara, termasuk dengan cara-cara inkonstitusional, yaitu dengan kudeta. Meskipun sejak

tahun 1991 Thailand memperjuangkan demokrasi, namun perjuangan rakyat Thailand ini tidak dapat menghentikan masuknya militer ke dalam arena politik. Kudeta sampai saat ini masih tidak bisa lepas dari perpolitikan Thailand.

Kudeta seakan seperti tradisi di negeri Gajah Putih ini. Sejak berakhirnya sistem pemerintahan monarki absolut 1932 tersebut, telah tercatat 24 kali terjadi kudeta militer di Negeri Gajah Putih ini, 10 kali di antaranya berhasil yaitu kudeta 24 Juni 1932, 20 Juni 1933, 9 November 1947, 29 November 1951, 26 September 1957, 21 Oktober 1958, 17 November 1971, 6 Oktober 1976, 20 Oktober 1977, dan kudeta 23 Februari 1991².

Jelas sudah bahwa kudeta bukan hal yang baru lagi bagi Thailand. Dalam sejarah Thailand, negeri ini telah mengalami 24 kali kudeta dalam kurun waktu 74 tahun. Namun kudeta yang terjadi pada tahun 2006 ini sungguh menarik perhatian dunia juga perhatian rakyat Thailand itu sendiri. Pasalnya setelah 15 tahun lamanya Thailand bebas dari kudeta, kini muncul kembali dengan kembalinya militer dalam perpolitikan Thailand. Kudeta terakhir yang terjadi di Thailand pada tahun 1991, yaitu Jenderal Sunthon Kongsomphong menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Chatchai Choonhavan. Sejak itulah militer Thailand menyatakan untuk tidak ikut campur dalam perpolitikan Thailand.

Setelah menghilang dari perpolitikan Thailand selama 15 tahun, kini militer Thailand kembali memperlihatkan perannya, dengan melakukan kudeta terhadap pemerintahan PM Thaksin Shinawarta. Kudeta militer yang dilancarkan

² Ibid., hal. 1. <http://www.kemlu.go.id/press/2007086.htm>

terhadap PM Thaksin, terjadi pada 19 September 2006, pada saat Thaksin tidak berada di Ibukota. Tidak ada yang menyangka, militer akan kembali ikut campur tangan dalam bidang politik. Di mana militer Thailand diperkirakan tidak akan lagi masuk dalam politik Thailand, Thailand akan menuju negara yang Demokratis seperti negara-negara Asia Tenggara lainnya. Namun, belum sempurna masa menuju demokrasi, Thailand dihadapkan dengan kudeta lagi. Akibat awal militer masuk ke panggung politik dengan cara kudeta maka perwira muda yang tidak puas akan sering melakukan kudeta.

Bahkan Panglima Angkatan Darat Sonthi juga mempunyai hasrat untuk melakukan hal tersebut. Meskipun ia pernah menegaskan bahwa ia tidak akan mengkudeta Pemerintahan Thaksin. Namun, pada tanggal 19 September 2006 Sonthi memimpin kudeta yang dilancarkan terhadap Thaksin Shinawatra.

Kudeta dalam kamus politik demokrasi merupakan sebuah penyakit kronis yang harus dihilangkan dari sistem politik. Demokrasi sebagai sebuah mekanisme politik menghendaki proses transformasi kekuasaan dilakukan melalui proses politik yang tidak mempergunakan instrumen kekuasaan. Sehingga apapun alasan dibalik kudeta, baik yang klise demi kesejahteraan umum, tertib sosial, penegakkan hukum ditolak keberadaannya.

Kudeta yang terjadi di Thailand adalah kudeta yang mana para jenderal justru mencari momen yang tepat, tatkala konsentrasi sipil untuk melakukan perubahan kepada rezim yang sedang berkuasa sudah kehabisan energi. Dalam hal ini masyarakat Thailand sudah sedemikian frustrasi untuk menggulingkan Thaksin

Thailand merupakan negara yang menganut sistem demokrasi parlementer. Namun hingga saat ini, sistem perpolitikan yang berjalan di Thailand belum sepenuhnya mencerminkan perilaku sebagai negara demokrasi yang matang. Hal ini terbukti dari rendahnya sistem *check and balance* yang ada di Thailand. Oposisi dibuat sebagai alat kontrol terhadap pemerintah, sepenuhnya bertindak untuk kepentingan rakyat. Oposisi harus mendukung pemerintah selama semua kebijakan yang ditetapkan demi kepentingan rakyat, tetapi pihak oposisi juga berhak memberi peringatan kepada pemerintah ketika pemerintah mulai mengabaikan segala kepentingan rakyat. Selain itu, budaya oposisi juga merupakan salah satu indikator yang perlu diperhatikan. Hal ini bertujuan agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang, sehingga dapat mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan secara tepat.

Meskipun kudeta dalam kamus politik demokrasi merupakan sebuah penyakit kronis yang akan dihilangkan dari sistem politik. Namun, dalam perpolitikan Thailand yang baru saja menuju perkembangan demokrasi, kudeta militer pun tetap di lancarkan oleh sekelompok militer kepada Perdana Menteri Thaksin Shinawatra pada tanggal 19 September 2006.

D. Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan dalam karya ilmiah ini adalah:

"mengapa militer melakukan kudeta terhadap pemerintahan DM Thaksin"

E. Kerangka Dasar Teoritik

Dalam menganalisa pokok permasalahan yang ada, penulis menggunakan dua teori yaitu Teori peran militer dalam politik oleh Samuel P Huntington yang akan diperkuat dengan peran militer menurut Almos Perlmutter. Sedangkan teori kedua yang dipakai adalah teori persepsi.

1. Teori Peran Militer dalam Politik

Samuel P Huntington, dalam bukunya *Political Order in Changing Societies* bahwasanya intervensi militer dalam politik disebabkan oleh *“the absence of effective politive political instituons capable of mediating, refining and moderating group political action”*³.

Huntington juga menegaskan bahwa faktor-faktor penting yang menyebabkan golongan militer melakukan intervensi bukanlah alasan yang bersifat militer, melainkan politis, karena lemahnya struktur kelembagaan dan kesemrawutan politis yang terjadi dalam masyarakat, sehingga dalam negara pretorian bukan hanya tentara, tetapi semua kekuatan sosial melakukan politisasi. Semua jenis kekuatan sosial dan kelompok terlibat secara langsung di dalam politik umum. Politisasi semua kekuatan sosial tersebut terjadi, menurut Huntington, khususnya disebabkan tidak terdapat lembaga politik yang efektif atau, walaupun ada, lembaga politik itu terlalu lemah untuk mengartikulasikan kepentingan publik.

Dalam sebuah sistem politik selalu terjadi berbagai tuntutan yang datangnya dari berbagai kelompok kepentingan, maupun dari kelompok kekuatan

³ Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies*, Yale University Press, New York.

politik dari rakyat melalui partai politiknya. Dan kemampuan pemerintah dalam menghadapi setiap tuntutan yang ada tersebut sangatlah terbatas dan tidak mungkin semuanya dapat dipenuhi, oleh karena itu dibutuhkan lembaga politik yang mampu menangani tuntutan tersebut. Akan tetapi tugas dari lembaga politik tidak hanya berhenti sampai disitu saja, namun lembaga politik haruslah mampu untuk dapat menyaring setiap tuntutan yang masuk tersebut, dimana dalam hal ini lembaga politik harus mampu membedakan antara tuntutan yang perlu diangkat menjadi isu politik maupun yang dikesampingkan. Terakhir, lembaga politik juga harus mampu melunakkan tuntutan-tuntutan yang bersifat ekstrim atau menjatuhkan. Dalam sistem politik, fungsi ini harus dilakukan oleh partai politik yang kuat supaya supremasi sipil dapat terwujud.

Menanggapi intervensi militer dalam politik ini, Huntington berpendapat bahwa pada hakekatnya hal ini sudah menyalahi etika militer profesionalnya dan merupakan sebuah tanda akan adanya pembusukan politik (*political decay*)⁴. Karena bagi Huntington, yang menekankan pembangunan politik melalui lembaga-lembaga politik, khususnya partai-partai politik, intervensi militer paling banyak dapat diterima jika merupakan suatu periode transisi dalam usaha menciptakan lembaga-lembaga politik yang kuat.

Ketidakefektifan lembaga politik yang berkuasa dalam sebuah sistem politik akan mengakibatkan militer pretoria aktif dalam politik dan turut serta untuk menangani gejolak yang muncul di masyarakat. Militer pretoria telah menjadi aktor politik yang dominan karena kemunculannya dilatarbelakangi

dengan upayanya yang ingin menggantikan pemerintahan sipil yang dianggap tidak berhasil, sehingga sebagai alat negara sudah menjadi tanggung jawabnya untuk memperbaiki keadaan dalam negeri dengan cara-cara militer.

Maka gejala intervensi militer terhadap politik disebabkan karena ketidakmampuan aparat sipil dalam menjalankan roda pemerintahan dapat digambarkan bahwasanya terdapat suatu hubungan antara stabilitas lembaga-lembaga sipil dan kecenderungan militer untuk melakukan intervensi. Semakin lemahnya infrastruktur politik, semakin besar kemungkinan intervensi militer tersebut. Sebaliknya semakin kuat serta semakin luas cakupan aparat sipil, maka semakin kecil keinginan militer untuk mengambil alih dan menjalankan roda pemerintahan.

Lemah atau kuatnya infrastruktur sosial-politik haruslah diartikan secara luas, dalam hal ini tidak terbatas pada jumlah, kemampuan teknis administrasi saja, melainkan juga mencakup kondisi mental rohani (korup, penyalahgunaan kekuasaan, malas dan tidak adanya rasa tanggung jawab serta tidak adanya rasa disiplin dari aparat pemerintah dan yang terakhir dan paling menjadi momok bagi suatu negara yaitu adanya perpecahan di dalam masyarakat itu sendiri), kondisi sosial ekonomi (ketimpangan-ketimpangan yang mencolok dalam kehidupan masyarakat dan ekonomi, penyalahgunaan sumber daya alam dan tenaga kerja), kondisi sosial-politik (lembaga-lembaga politik yang tidak valuable, anarki, tidak adanya kredibilitas) merupakan penyebab intervensi militer dalam kehidupan politik di suatu negara. Begitu pula yang terjadi pada sistem politik Thailand yang sering tidak stabil karena terdapat lembaga militer. Lembaga politik dianggap tidak

mampu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada dengan baik maupun konflik-konflik yang muncul dalam masyarakat.

Tentang profesionalisme militer, Huntington menggunakan analogi yang sederhana. Jika tanggung jawab pokok dari seorang dokter adalah kepada pasiennya, dan seorang pengacara kepada kliennya, maka tanggung jawab pokok seorang perwira militer adalah kepada negara. Seperti dokter dan pengacara, perwira hanya mengurus satu segmen dari berbagai kegiatan kliennya. Ia hanya menjelaskan kepada kliennya mengenai kebutuhan dalam bidang ini, menyarankan hal-hal yang dapat memenuhi segala kebutuhan klien tersebut, dan setelah kliennya tersebut mengambil keputusan, membantu klien tersebut menerapkan itu semua.

Pada batasan tertentu, perilaku seorang perwira militer terhadap negara dituntut oleh suatu kode yang tersurat dalam hukum yang setara dengan norma-norma etika profesional para dokter dan pengacara. Sebagian besar kode etik perwira diungkapkan dalam kebiasaan, tradisi, dan semangat profesi yang berkesinambungan.⁵ Huntington menambahkan bahwa profesionalisme tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan, skill, dan expertise seseorang atau lembaga terhadap pekerjaan yang menjadi bidangnya saja, tetapi juga memiliki ciri-ciri khusus lain. Salah satu hal yang bisa disebut sebagai ciri khusus di sini adalah *responsibility*.

Begitu pula dalam dunia militer, profesionalitas tidak hanya dimaknai sebagai kemahiran atau kemampuan dalam menggunakan senjata, tetapi tanggung

jawab akan tugasnya sebagai lembaga yang bertugas dalam masalah pertahanan negara. Dalam pandangan Huntington, profesionalitas militer tidak hanya dalam konteks mahir dalam menggunakan senjata dan dilatih dalam tugasnya saja, tetapi juga harus dapat menggunakan kemampuan analisis, pandangan luas, imajinasi dan pertimbangan.

Kudeta yang dilakukan oleh militer merupakan suatu wujud kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa dan negara yang dimiliki oleh sekelompok pasukan tentara. Sebagai tentara yang seluruh pengabdianya hanya diperuntukan untuk demi kesetiaan kepada bangsa dan negara, maka pasukan militer tidak mempunyai pilihan diantara pilihan setia pada bangsa dan negara atau setia kepada pemimpin negara yang menyebabkan kehancuran.

Menurut Amos Perlmutter, militer adalah sebuah organisasi yang paling sering melayani kepentingan umum tanpa menyertakan orang-orang yang menjadi sasaran usaha-usaha organisasi itu. Militer adalah suatu profesi sukarela karena setiap individu bebas memilih suatu pekerjaan di dalamnya, namun juga bersifat memaksa karena para anggotanya tidak bebas untuk membentuk suatu perkumpulan sukarela melainkan terbatas kepada suatu situasi hirarki birokrasi⁶.

Militer merupakan suatu kesatuan organisasi yang sangat kuat dan patuh, maka tidak sulit bagi pemimpin pasukan tentara untuk menggerakkan pasukan-pasukannya melawan pemerintahan yang gagal. Hal tersebut dikarenakan adanya kepatuhan bawahan terhadap pimpinan militer, seperti yang dikatakan Yahya Muhaimin dalam bukunya, bahwa militer mempunyai empat karakter penting

⁶ Amos Perlmutter, *The Military and Society*, New York, 1969, hal. 14

yang membedakan dengan organisasi lain. Empat karakter tersebut adalah bahwa militer, menurut Yahya merupakan organisasi yang paling terorganisir, menguasai teknologi, bersifat hierarki, dan juga mobilitas yang tinggi. Selain itu, tentara juga mempunyai kekuatan yang sangat menonjol dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Kekuatan tersebut adalah kekuatan senjata yang sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai alat kekuasaan jika hal tersebut diperlukan. Sebagai seorang pretorian yang menunjukkan kalau mereka adalah perwira yang bertanggung jawab dan berjiwa nasional. Rasa kebangsaan mementingkan orang banyak ini menyebabkan mereka tidak punya pilihan lain kecuali mempertahankan konstitusi dan negara dari pengaruh pemerintah sipil yang sangat labil.⁷

Karena mobilitas pretorian ini sangat tinggi dibandingkan dengan mobilitas prajurit profesional klasik, maka orientasi korporasi status, dan ideologi militer lebih penting ketimbang skill dan pengetahuan sebagai persyaratan profesional. Loyalitas politik dan kecakapan merancang dan melakukan kudeta menggantikan kecakapan-kecakapan tradisional para prajurit profesional⁸.

Militer di Thailand tidak mengklaim diri mereka sebagai "pejuang kemerdekaan". Akan tetapi, mereka adalah "pemain utama" dalam melahirkan Thailand modern. Mereka memainkan peran penting dalam "revolusi rakyat" 1932, yang memaksa Raja Prajadipok (Rama VII) melepaskan kekuasaan absolutnya.

Untuk mempertegas teori Huntington, Amos Perlmutter juga menyatakan bahwa pihak sipil yang memerintah tidak mempunyai pengalaman politik dan

⁷ *Journal of Democracy*, 1992, diakses pada 10 Maret 2007

lambang-lambang kekuasaan, maka personil militer mungkin akan mampu memanipulasikan lambang-lambang mereka untuk memerintah dan memperkenalkan keserasian masyarakat. Sekalipun para pemimpin militer cenderung kurang giat dan bijaksana ketimbang pemimpin-pemimpin sipil, sifat-sifat seperti kenetralan dan keberanian dapat membuat para pemimpin militer lebih efektif. Dalam hal ini, mereka lebih sanggup berkomunikasi dengan rakyat karena mereka dapat memancing respons psikologi secara simbolis. Selain itu, mereka dapat diharapkan mengatasi sindrome disorganisasi sosial sejauh mereka memelihara jarak dengan bagian-bagian yang terdapat di dalam rakyat yang secara politik aktif.

Kudeta militer yang dipimpin oleh Panglima Jenderal Shonti Boonyaratglin atau mantan Panglima Angkatan Darat Thailand, merupakan akibat dari keadaan politik dalam negeri Thailand yang dipimpin oleh Thaksin Shinawarta mengalami krisis berkepanjangan di mana dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya sudah tidak demokratis lagi. Kudeta yang dilakukan oleh militer tersebut dilakukan karena adanya banyak tuntutan dari berbagai kalangan mengenai berbagai korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan Thaksin serta kebijakan Thaksin di Thailand Selatan yang dirasa tidak demokratis lagi. Dengan keadaan tersebut krisis politik yang terjadi menyebabkan negara tersebut semakin terpuruk selama setahun terakhir. Jika hal ini tetap dibiarkan maka akan bertambah terpuruk dan mengakibatkan perpecahan.

Oleh karena itu, militer tidak bisa diam saja, meskipun rumor kudeta telah terdengar beberapa bulan terakhir namun puncaknya pada tanggal 19 September

2006 lalu militer dengan mengerahkan pasukannya untuk melakukan kudeta terhadap Thaksin Shinawarta. Kekuasaan sementara pemerintahan Thailand, dipegang oleh Shanti Boonyaratglin, yaitu pemimpin kudeta militer tersebut dan ia berjanji akan menyerahkan pemerintahan sesegera mungkin kepada penguasa sipil yang baru.

2. Teori Persepsi

Untuk menganalisa masalah-masalah kudeta yang dilaksanakan militer terhadap PM Thaksin Shinawatra, penulis menggunakan Teori Persepsi sebagai kerangka dasar pemikiran yang dianggap dapat menjelaskan pokok permasalahan yang ada.

Ada beberapa definisi tentang teori Persepsi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut Daniel S. Papp, persepsi adalah:

*When International actors formulate an action or a policy, perceptions of situations, events and other involved actors form the bases of those actions and policies. Thus an actors perceptions must be examined and understood if that actor's actions and policies are to be understood.*⁹

Ketika aktor internasional merumuskan suatu tindakan atau kebijakan, persepsi terhadap situasi, fakta-fakta dan yang lainnya menyebabkan aktor tersebut membentuk asumsi yang mendasari suatu tindakan atau kebijakannya. Maka persepsi seorang aktor harus bisa diuji dan dimengerti jika tindakan dan kebijakan aktor tersebut ingin dimengerti.

Sedang menurut K.J Holsti, Persepsi adalah *Man acts and reacts according to his image of the environment.*¹⁰ (seseorang bertindak dan memberi reaksi menurut citranya terhadap lingkungan itu). Yang berarti bahwa, orang akan

⁹ Daniel S. Papp, *Contemporary International Relations Framework For Understanding (Second editions)*, Macmillan Publishing Company, New York, 1988, hal.155

¹⁰ K.J. Holsti, *International Politics A Framework For Analysis (Third Edition)*, Prentice Hall of India Private limited, New Delhi, 1981, hal.367

melakukan tindakan berdasarkan apa yang mereka “ketahui”. Tanggapan seseorang terhadap situasi tergantung pada bagaimana ia mendefinisikan situasi tersebut.

Menurut Holsti, sistem keyakinan terdiri dari serangkaian citra yang membentuk keseluruhan kerangka acuan atau sudut pandang (universe) seseorang. Citra-citra tersebut meliputi realitas masa lalu, masa kini dan realitas yang diharapkan di masa depan, dan preferensi nilai tentang apa yang ‘seharusnya terjadi’. Jadi, sistem keyakinan menjalankan peranan penting bagi seseorang, karena membantunya berorientasi terhadap lingkungan, mengorganisasikan persepsi sebagai penuntun tindakan, menentukan tujuan dan bertindak sebagai saringan dalam menyeleksi informasi dalam setiap situasi.¹¹ Sebagaimana juga dikatakan oleh Walter S Jones, keyakinan adalah sikap bahwa suatu deskripsi realitas adalah benar, terbukti atau telah diketahui. Keyakinan sering didasarkan kepada penerimaan informasi yang sebelumnya dari lingkungan, meskipun hal itu tidak sama dengan data itu sendiri. Ini adalah suatu pernyataan analisis yang menghubungkan satuan-satuan data ke dalam suatu pola yang telah teruji.¹²

Dalam pembentukan sebuah persepsi, ada beberapa proses yang terjadi hingga sebuah persepsi terbentuk. Bagaimana persepsi mempengaruhi perilaku, ini diawali dengan adanya nilai-nilai dan keyakinan seseorang yang membantunya menentukan suatu stimulus atau rangsangan. Kemudian berdasarkan sikap dan citra yang telah dipegang selama ini, stimulus tersebut diinterpretasikan. Setiap

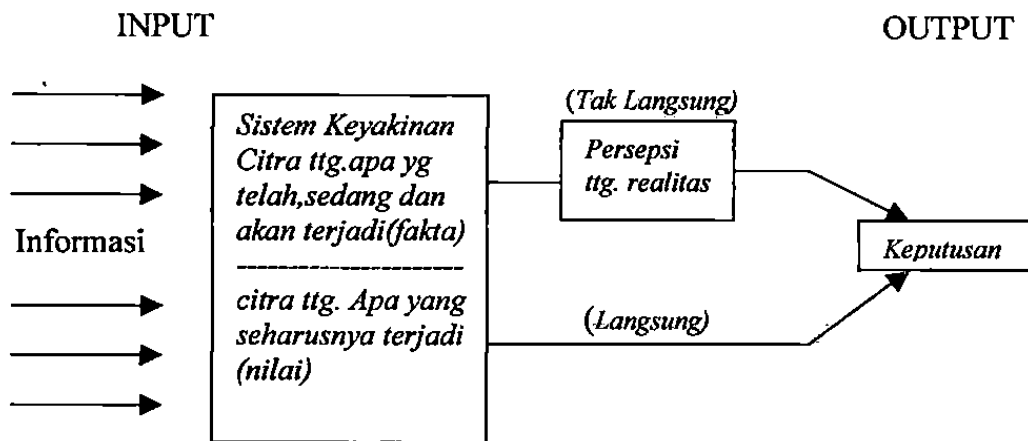
¹¹ Walter S Jones, *Logika Hubungan Internasional Persepsi Nasional I*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal 276-277

¹² James e. Dougherty and Robert Pfaltzgraff Jr, *Contending Theories of International Relations; A*

orang memiliki serangkaian citra yang berbeda-beda untuk menginterpretasikan informasi yang masuk. Persepsi atau citra yang dimiliki individu bersifat dinamik, karena persepsi seringkali berubah.

Gambar 1.1

Hubungan Antara Sistem keyakinan dengan Pembuatan Keputusan



Sumber: Ole R. Holsti, "The Belief System and National Image: A Case Study", dikutip dalam Brusset and harvey Starr, *World Politics*, (New York: Freeman, 1985), hal 304.

Berdasar pada gambar hubungan antara sistem keyakinan dan pembuatan keputusan diatas dapat diartikan bahwa dalam sebuah sistem keyakinan dan pembuatan keputusan terdapat beberapa input yang mempengaruhi proses untuk pengambilan keputusan/ output. Input yang akan mempengaruhi sistem keyakinan tersebut berupa segala informasi mengenai fakta yang sedang terjadi dalam suatu lingkungan, baik itu informasi yang bersifat mendukung fakta maupun yang bertentangan. Informasi-informasi tersebut akan mempengaruhi citra dan pandangan orang, citra tentang hal yang sedang terjadi, yang diperkirakan kemudian akan terjadi dan citra mengenai hal yang seharusnya terjadi, baik individu maupun dalam lingkaran institusi / lembaga yang kemudian akan

menghasilkan persepsi tentang realitas dan menjadi dasar bagi pembuatan keputusan.

Berdasar pada teori tersebut, ada beberapa nilai dan keyakinan yang menyebabkan militer melakukan kudeta terhadap PM Thaksin Sinawatra. Militer memiliki citra bahwa dalam pemerintahan Thailand terdapat ketidakstabilan politik terkait dengan beberapa kebijakan pemerintah yang disinyalir merugikan negara. Kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut pada akhirnya mendatangkan ketidakpuasan dalam beberapa kalangan. Dalam hal ini, militer sebagai salah satu institusi negara yang seharusnya tidak memiliki kekuatan secara politis pada akhirnya merasa perlu menetapkan beberapa keputusan internal militer untuk menyikapi permasalahan yang terjadi tersebut.

Militer melakukan kudeta terhadap PM Thaksin Sinawatra didasarkan pada beberapa informasi yang berkembang dalam lingkup pemerintahan Thailand pada masa tersebut. Beberapa informasi yang masuk menjadi input mempengaruhi citra militer sehingga menetapkan keputusan untuk militer melakukan kudeta. Ada beberapa informasi yang berkembang terkait dengan beberapa kebijakan yang ditetapkan Thaksin. Diantara beberapa kebijakan tersebut adalah kebijakan pemerintah yang terlalu represif dalam menangani kelompok sparatis di Thailand Selatan, kebijakan tersebut justru semakin memperkeruh suasana di Thailand selatan. Selain itu beberapa skandal tentang korupsi seperti korupsi dalam pembangunan bandar udara Suvarnabhumi, skandal penjualan perusahaan Shin Corp maupun skandal pemberian pinjaman kepada pemerintah Myanmar atas keuntungan Shin Corp membentuk citra militer. Citra citra serta keyakinan

tersebut membentuk persepsi bagi militer, memandang bahwa telah terjadi ketidakbecusan dalam pemerintahan sehingga pada akhirnya membentuk keputusan untuk militer melakukan kudeta terhadap PM Thaksin Sinawatra.

F. HIPOTESA

Dari permasalahan tersebut dapat dilihat bahwa penyebab kudeta militer yang terjadi di Thailand adalah hal yang spekulatif. Dalam hal ini, penulis mengambil beberapa hipotesa bahwa penyebab militer melakukan kudeta adalah sebagai berikut:

1. Kondisi umum Pemerintahan Thaksin Shinawatra yang menurun, ditandai dengan adanya penyalahgunaan wewenang sebagai PM serta penetapan kebijakan kasus Thailand Selatan yang tidak relevan.
2. Adanya peran pihak oposisi dalam penurunan Thaksin, terlihat melalui adanya pemboikotan 3 Partai oposisi, pembentukan aliansi anti-Thaksin dan peranan kelas menengah penggulingan Thaksin.
3. Dukungan Raja dalam kudeta.

G. JANGKAUAN PENELITIAN

Sebagai suatu keharusan dari sebuah penulisan maka di butuhkan batasan-batasan waktu yang jelas dalam masa peninjauan penelitian, jangkauan waktu penelitian ini dimulai dari awal revolusi Thailand tahun 1932 sampai dengan terjadinya kudeta militer terhadap Thaksin Shinawatra tahun 2006

H. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka atas berbagai literatur yang relevan dengan penulisan. Selain itu juga didukung oleh berbagai surat kabar, majalah, internet, dan dokumen-dokumen yang memuat tentang kudeta militer di Thailand.

Sedangkan metode penulisan yang akan penulis gunakan adalah metode *Eksplanasi*, yaitu berupa penjelasan atas pertanyaan mengapa. Penulis akan mencari faktor-faktor yang menyebabkan suatu fenomena bisa terjadi berdasarkan data dan fakta-fakta yang terkumpul.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini akan terbagi kedalam lima bab, hal tersebut dimaksudkan agar permasalahan ini dapat dibahas secara teratur serta saling berkaitan menuju pokok permasalahan, maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut ;

Bab. I Pendahuluan

Dalam bab ini dikemukakan tentang permasalahan yang berhubungan dengan penulisan skripsi sesuai dengan judul yang meliputi : Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Teori, Hipotesa, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian, dan **Sistematika Penulisan**

Bab II. Kudeta Militer Dalam Perpolitikan Thailand.

Dalam BAB ini akan membahas tentang politik dan pemerintahan Thailand, militer Thailand dan peran militer dalam upaya kudeta militer terhadap Thaksin Shinawarta.

Bab III. Pemerintahan Thaksin Shinawatra

BAB ketiga ini akan memuat tentang latar belakang, perjalanan karir politik Thaksin dan kebijakan-kebijakan Thaksin dalam pemerintahan Thailand

Bab IV. Faktor-Faktor Penyebab Militer Melakukan Kudeta Terhadap Perdana Menteri Thaksin Shinawarta.

BAB ini akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab militer melakukan kudeta terhadap PM Thaksin Shinawarta pada September 2006.

Bab V. Kesimpulan

Dalam bab terakhir dari skripsi ini adalah kesimpulan yaitu sebuah inisiasi dari bab-bab sebelumnya yang telah membahas pokok permasalahan yang penulis